

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya, guna mengurangi pengangguran, masyarakat miskin, serta inflasi yang terjadi di Negara tersebut. Maka Pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan untuk mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata “Pajak”. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi Pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya demi tercapainya Negara yang makmur dan sejahtera. Maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh Negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah. (Yunus dan Abdul Thalib, 2010, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Jurnal Economic Resources, 11(30) : hal 91-99)

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. (Yunus dan Abdul Thalib, 2010, Analisis Kontribusi

Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Jurnal *Economic Resources*, 11(30) : hal 91-99)

Kabupaten Barito Utara dengan perekonomian yang sedang berkembang mempunyai penghasilan daerah yang besar salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Barito Utara adalah dari sektor pajak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang penerimaan di daerah. Diantaranya, melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut dikarenakan suatu alasan sehingga menghambat pendapat daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. (Dispenda Kalimantan Tengah)

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. (Peraturan Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Dari beberapa penelitian tentang pajak daerah telah dilakukan diantaranya oleh Tusakdiah (2011) yang menyatakan bahwa dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak harus mengisi surat pendaftaran, penetapan pajak kendaraan, pembayaran kendaraan, penagihan pajak, sanksi administrasi pajak dan banyaknya masyarakat tidak mengetahui sistem tata cara pembayaran pajak kendaraan.

Motivasi penulis untuk menulis judul skripsi ini karena penulis melihat semakin berkembangnya daerah Kabupaten Barito Utara maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016?
2. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan dengan “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016”.

D. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Untuk mengetahui jenis kendaraan bermotor apa saja yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

1. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan

2. Aspek praktis

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dalam mengelolah penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

